

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa simpulan terkait pengaruh variabel RLS, AHH, dan PPK terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan hubungan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya, peningkatan pendidikan formal belum secara langsung mendorong partisipasi kerja penduduk usia kerja, karena TPAK lebih dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah.
2. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara nyata mendorong keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja.
3. Pengeluaran Per Kapita (PPK) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya, peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga cenderung menurunkan partisipasi kerja karena individu memiliki fleksibilitas untuk menunda atau mengurangi intensitas bekerja.
4. Hasil uji persamaan yang dilakukan menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pengeluaran Per Kapita (PPK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perbedaan pengaruh TPAK antarprovinsi mencerminkan variasi karakteristik wilayah, struktur ekonomi, dan kondisi sosial-ekonomi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sehingga partisipasi tenaga kerja terbentuk dari keterpaduan faktor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal perlu selaras dengan peluang kerja yang tersedia. Pemerintah daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur perlu memastikan bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diikuti oleh pengembangan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Pemerintah Kalimantan Barat perlu menyesuaikan pendidikan dengan peluang kerja di sektor pertanian dan jasa sederhana, sementara Kalimantan Timur harus menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri dan pertambangan melalui pelatihan teknis. Langkah ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal, serta sertifikasi kompetensi yang relevan dengan sektor unggulan masing-masing provinsi, seperti pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Dengan demikian, peningkatan pendidikan dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi angkatan kerja.
2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus terus menjadi fokus kebijakan. Mengingat Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh positif terhadap TPAK, Kalimantan Barat sebaiknya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi bagi tenaga kerja di sektor pertanian dan perdagangan, sedangkan Kalimantan Timur fokus pada kesehatan fisik dan keselamatan pekerja industri padat modal. pemerintah daerah perlu memperkuat layanan kesehatan, gizi, dan program kesejahteraan sosial untuk memastikan tenaga kerja memiliki kapasitas fisik dan mental yang memadai. Peningkatan kesehatan tidak hanya meningkatkan kemampuan bekerja, tetapi juga memperpanjang masa partisipasi dalam pasar tenaga kerja, sehingga mendorong produktivitas dan stabilitas pasar kerja regional.
3. Pengelolaan kesejahteraan ekonomi rumah tangga perlu diperhatikan untuk mendorong partisipasi kerja. Temuan negatif signifikan pada Pengeluaran Per Kapita (PPK) menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat membuat sebagian individu menunda atau mengurangi keterlibatan di pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mendorong keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan partisipasi kerja, misalnya

melalui insentif bagi tenaga kerja produktif, program kerja fleksibel, atau dukungan bagi pekerja muda dan perempuan agar tetap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa mengurangi kesejahteraan rumah tangga.

4. Pendekatan kebijakan ketenagakerjaan perlu bersifat integratif dan multidimensional. Mengingat RLS, AHH, dan PPK secara simultan memengaruhi TPAK, pemerintah daerah disarankan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mengintegrasikan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja yang relevan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pengembangan industri padat karya, serta program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat mendorong partisipasi kerja secara berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, peningkatan kesejahteraan rumah tangga sebaiknya dibarengi program kerja fleksibel dan pelatihan, sementara di Kalimantan Timur perlu insentif dan pelatihan khusus agar masyarakat tetap aktif di sektor formal dan padat modal

5.2.2. Saran Teoritis

1. Studi ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan terkait tingkat partisipasi angkatan kerja di tingkat regional dengan memperluas cakupan wilayah atau jumlah provinsi yang diamati. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi partisipasi angkatan kerja, seperti tingkat upah, struktur sektor ekonomi, tingkat pengangguran, atau kualitas pendidikan, guna memperkaya pengujian *Human Capital Theory* dan *Labour Supply Theory* dalam konteks pembangunan regional.
2. Penggunaan model analisis yang berbeda, seperti Dynamic Panel Data (GMM), pendekatan spasial, atau metode ekonometrika lainnya, dapat memberikan perspektif baru dan memperkuat hasil penelitian. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengatasi potensi permasalahan endogenitas serta menangkap dinamika jangka panjang dalam keputusan penawaran tenaga kerja secara lebih komprehensif.